BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, implementasi adalah tahap berikutnya dalam proses kebijakan publik. Dengan mengirimkan kebijakan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang diharapkan, dengan begitu dapat disebut implementasi. Persiapan serangkaian peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut yang termasuk dalam daftar kegiatan. Dimana pembangunan dan perkembangan suatu daerah, pastinya tidak luput dari angka kelahiran yang berarti adanya penambahan penduduk khususnya anak-anak. Dengan begitu pemerintah mengembangkan serta menerapkan suatu kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan kondisi sumberdaya, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan.¹ Konsep ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kasus di mana anak menjadi korban kekerasan, diskriminasi, pergaulan bebas, eksploitasi, pemerkosaan, dan pekerja anak di bawah umur.

Berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah maka hal ini apabila dilihat secara garis besarnya maka hak anak yang perlu untuk diperjuangkan dan diperhatikan. Karena Indonesia pun mengakui bahwa hak asasi manusia juga

¹ Keputusan Walikota Ternate Nomor: 16/II.9/KT/2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Ternate Tahun 2021-2023

meliputi semua hak anak, yang berarti bahwa anak-anak memiliki hak yang sama dan tidak dapat dilayani dengan cara yang berbeda dari kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi ini mewajibkan pemerintah setiap negara yang meratifikasi atau mengambil tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional agar menerapkan hak-hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang kuat di negara mereka. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) membagi hak-hak anak ke dalam empat kategori utama: hak bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Hak ini tentunya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk turut menyusun strategi dalam mewujudkan hak-hak anak, di Indonesia kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah kota yang mempertimbangkan hak dan kewajiban anak saat merencanakan, menetapkan, dan menjalankan program pembangunannya. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pemerintah kota atau daerah tentunya juga turut berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak. Dalam hal partisipasi anak, kebutuhan anak, dan hak-hak anak adalah komponen penting dari suatu program pemerintah sendiri yang merupakan keputusan dan kebijakan pemerintah. Konsep kebijakan Kota Layak Anak digambarkan sebagai lingkungan perkotaan yang ramah anak di mana anak dapat mendapatkan akses fasilitas yang diperlukan. Dalam upaya pemerintah tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk mengutamakan hak anak bukanlah upaya isapan jempol semata, walau begitu pada Kota Ternate sendiri sudah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak. Hak-hak anak yang dimuat dalam Peraturan Daerah yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Namun demikian dalam penerapannya kebijakan Kota Layak Anak masih menghadapi banyak masalah dan hambatan, terutama di Kota Ternate sendiri. Karena berbagai dan beragam tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, melindungi dan memenuhi hak anak merupakan masalah penting. Hak anak untuk bersekolah, untuk berkembang, berpartisipasi, dan dihargai merupakan salah satu dari banyak masalah hak-hak anak. Proses perkembangan Kota Ternate

dalam menghadapi persoalan tentang Kota Layak Anak sendiri sudah berjalan walaupun masih perlu banyak perhatian lagi dari pemerintah Kota maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen Kota Ternate untuk mewujudkan Kota Layak Anak yang dapat dilihat dari penghargaan yang diraih pada tahun 2023, sebagai kategori Nindya dengan perolehan nilai 772, yang jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan perolehan nilai 733. Dengan demikian, dapat lihat bahwa implementasi pemerintah dalam kebijakannya berjalan dengan baik atau dengan kata lain pemerintah telah berkomitmen dalam memnuhi pelaksanaan kebijakannya karena dinilai telah memenuhi kriteria dalam evaluasi kategori untuk Kota Layak Anak. Sementara data presentase anak yang telah diregistrasi serta anak yang memiliki akte kelahiran, didata oleh Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menunjukkan bahwa dalam kurung waktu 2021-2022 mengalami kenaikan yang berarti pertumbuhan angka kelahiran juga semakin meningkat.

Tabel 1.
Persentase Anak Yang diregistrasi.

No	Kecamatan	Persentase Anak di Registrasi	
		2 Tahun Sebelumnya (Tahun 2021)	Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)
1	Pulau Ternate	2.752	2.971
2	Ternate Selatan	23.607	24.832
3	Ternate Utara	15.500	16.490
4	Moti	1.512	1.582
5	Pulau Batang Dua	838	885
6	Ternate Tengah	17.623	18.538
7	Pulau Hiri	904	952
8	Ternate Barat	2.862	3.062
Total		65.598	69.312

Sumber : Pemerintah Kota Ternate Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Presentase Data Anak yang di Registrasi, 2023.

Sesuai sumber yang diambil dari pemerintah kota ternate Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, presentase data anak yang di registrasi menjelaskan bahwa pada tahun 2021 kecamatan pulau ternate mendapatkan 2,752% anak yang

diregistrasi, hasil ini lebih rendah jika dibanding dengan pada tahun 2022 yang menghasilkan 2,971%.²

Maka dari pada itu merupakan catatan penting bagi pemerintah maupun instansi terkait dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Ternate, karena sudah tercantum sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Meningkatkan kesejahteraan anak adalah tujuan pencanangan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Ternate sendiri juga berusaha memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama anak-anak, dengan mengembangkan dan menjalankan program yang sesuai dengan Peraturan yang sudah dibentuk. Untuk saat ini, program untuk membangun Kota Layak Anak dianggap telah tercapai. Namun penerapan Kota Layak Anak masih membutuhkan perbaikan untuk dapat naik ke kategori Utama dengan perolehan nilai sebanyak 800, terutama di dalam pengembangan pemenuhan hak-hak anak. Apabila dilihat dari pertumbuhan angka kelahiran dan juga fakta lapangan bahwa anak-anak sering kali menjadi objek untuk dimanfaatkan sebagai penghasil uang dengan cara eksploitasi, berjualan hingga larut malam ataupun diperalat untuk meminta donasi dengan maksud penggalangan dana untuk kejadian tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul : **“Implementasi Kota Layak Anak di Kota Ternate**

² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Persentase Anak yang di registrasi, Tahun 2023.

(Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kota Layak Anak di Kota Ternate (Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anask)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kota Layak Anak di Kota Ternate (Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terwujudnya Implementasi Kota Layak Anak di Kota Ternate (Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak).
2. Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kota Layak Anak di Kota Ternate (Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian begitu bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dengan cara melakukan uji terhadap penerapannya secara nyata di lingkungan masyarakat. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi pada pengetahuan Implementasi Kota Layak Anak di Kota Ternate (Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak).

2. Manfaat praktis

Bagi penulis penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan tentang masalah dalam Implementasi Kota Layak Anak di Kota Ternate (Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak). Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah, maupun swasta yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai pengabdian dibidang Hukum tentang Terwujudnya Implementasi

Kota Layak Anak di Kota Ternate (Melalui Pemenuhan Hak Anak dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak).